

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.6 Kerangka Konseptual.....	10
1.7 Metode Penelitian.....	12
1.8 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II POTRET JAMBI LUAR KOTA.....	19
2.2 Kondisi Geografis.....	19
2.3 Keadaan Penduduk dan Budaya.....	20
2.4 Perekonomian Jambi Luar Kota	22
BAB III PERKEMBANGAN KEWEDANAAN JAMBI LUARKOTA.....	24
3.1 Pembentukan Kewedanaan Jambi Luar Kota.....	24
3.2 Sistem Pemerintahan Kewedanaan Jambi Luar Kota.....	28
BAB IV PENGHAPUSAN KEWEDANAAN JAMBI LUAR KOTA.....	34

4.2 Jambi Luar Kota Dalam Keresidenan Jambi.....	34
4.3 Jambi Luar Kota Dalam Provinsi Sumatera Tengah.....	37
BAB V PENUTUP.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengurus KNI Djambi Tahun 1945

Tabel 2.2 Susunan Pejabat Sipil Keresidenan Jambi

Tabel 2.3 Susunan Pembantu Residen Jambi

DAFTAR GAMBAR

Lampiran 1. Penelitian di Dinas Arsip Daerah Provinsi Jambi

Lampiran 2. Penelitian Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Muaro Jambi

Lampiran 3. Penelitian Pada BPS Kabupaten Muaro Jambi

Lampiran 5. Suraat Selesai Penelitian Penelitian Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip

Lampiran 4. Surat Selesai Penelitian enelitian Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Sejarah dan Purbakala Kabupaten Muaro Jambi

DAFTAR ISTILAH

- Afdeling** : Bahasa Belanda: *Afdeeling*) adalah sebuah wilayah administratif pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda setingkat Kabupaten. Administratornya dipegang oleh seorang asisten residen. Afdeling merupakan bagian dari suatu karesidenan. Suatu afdeling dapat terdiri dari beberapa *onderafdeling* (setingkat kawedanan yang diperintah seorang wedana bangsa belanda yang disebut Controleur) dan *landschap* yang dikepalai oleh seorang bumiputera yang disebut *hoofd* atau kepala.
- Daerah Tingkat I** : Adalah nama pembagian administratif di Indonesia di bawah tingkat nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, istilah tersebut tidak dipergunakan lagi, diganti dengan istilah Provinsi. Di Indonesia ada tiga jenis provinsi: provinsi (biasa), Daerah Istimewa dan Daerah Khusus Ibu kota. Provinsi dikepalai oleh seorang Gubernur, tetapi di Daerah Istimewa Yogyakarta, sang gubernur tidak dipilih melainkan Raja yang jabatannya diwariskan dan merupakan ahli waris dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang bergelar Sultan.
- Kawedanan** : Wilayah administrasi pemerintahan yang berada di bawah kabupaten dan di atas kecamatan. Bentuk wilayah ini berlaku pada masa Hindia Belanda dan beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia di beberapa provinsi, misalnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemimpin suatu kawedanan disebut wedana. Di wilayah, Kalimantan (khususnya di Kalimantan Selatan) wedana dipanggil juga kiai. Di beberapa daerah, ada juga yang bentuk wilayahnya disebut kademangan dengan dipimpin oleh seorang demang.
- Kabupaten** : Adalah suatu satuan teritorial sekaligus pembagian wilayah administratif setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Namun yang membedakan ialah kabupaten cenderung lebih mengarah ke wilayah teritorial yang memiliki kota-kota kecil berupa kota kecamatan seperti halnya kota-kota di provinsi, sedangkan kota Dati II (kota madya) mengarah ke suatu tempat dimana tempat pemukiman dan

infrastruktur merata di seluruh wilayah yang tidak memiliki kota-kota kecamatan di sebuah kota seperti layaknya kabupaten. Penataan hubungan antara Gubernur dengan Bupati dan juga Wali Kota (khusus kota madya) dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan penataan kelembagaan yang dapat mensinergikan hubungan kewenangan pemerintahan yang efektif antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota (Kota Madya bukan Kota Kecamatan). Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang yang sama dalam mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri

Provinsi

: Adalah suatu satuan teritorial, seringnya dijadikan nama sebuah wilayah administratif pemerintahan di bawah wilayah negara atau negara bagian. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda "*provincie*" yang berasal dari bahasa Latin dan pertama kalinya digunakan di Kekaisaran Romawi Kuno, yang merupakan unit teritorial dan administratif utama dari kepemilikan teritorial Kekaisaran Romawi di luar Italia. Mereka membagi wilayah kekuasaan mereka atas beberapa "*provinciae*" (peringkat kedua di bawah kekaisaran untuk wilayah kekuasaan di luar Italia). Sebuah provinsi hampir selalu merupakan divisi administrasi dalam suatu negara bagian. Istilah provinsi telah diadopsi oleh banyak negara. Di beberapa negara tanpa provinsi sebenarnya, "provinsi" adalah istilah metaforis yang berarti "di luar ibu kota".

Onderafdeling

: adalah suatu wilayah administratif setingkat kawedanan yang diperintah oleh seorang wedana bangsa Belanda yang disebut Kontrolleur (istilah ini kemudian disebut Patih) pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sebuah onderafdeling terdiri atas beberapa landschap yang dikepalai oleh seorang hoofd dan beberapa distrik (kedemangan) yang dikepalai oleh seorang *districthoofd* atau kepala distrik setingkat asisten wedana.